BAB IV

ANALISA DATA

A. Makna Politik Kiai dalam Pilkada Bondowoso Studi Kasus Tahun 2008

Keterlibatan kiai dalam gelanggang politik praktis sebenarnya merupakan tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan tanpa mempertimbangkan banyak hal, terutama posisi kiai sebagai kiblat kultur masyarakat. Banyak orang yang sangat menyesali pilihan keterlibatan kiai dalam politik praktis ini. Sebab, terlibat dalam politik praktis sama halnya dengan menggiring kiai dalam arena yang tidak pas bagi sosok kiai. Dunia politik adalah dunia pertarungan dan pertaruhan kepentingan yang dahsyat sehingga bisa memaksa kiai melakukan berbagai cara untuk memenangkan pertarungan. Tidak heran apabila masyarakat mengharapkan kiai berada diposisi semula, sebagai wasit kultural masyarakat.[1]

Dalam konteks ini, berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan, dan berhubungan dengan makna politik perspektif kiai dalam pilkada di kabupaten Bondowoso pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Pertama, pendapat KH. Abdul Qodir Syam, menurutnya kiai merupakan sosok figur karismatik yang paling tidak harus mampu menjawab, dan mengemban tiga peran penting. *Pertama,* politik harus mampu untuk menampung aspirasi dari segala masalah yang terjadi di masyarakat. Sosok kiai adalah orang yang sabar dalam mendengarkan, sambil memecahkan dan menemukan solusi yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, kiai dianggap

[1] Ibnu Hajar, *Kiai Ditengah Pusaran Politik Antara Petaka dan* Kuasa (Yogjakarta: IRCiSoD, 2009), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sosok yang paling bijaksana. *Kedua,* menjadi penengah dalam setiap perselisihan dan perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat. Ketidak berpihakan kiai pada kelompok tertentu dalam konflik dan perbedaan memungkinkan ia mampu mendamaikan dan menyatukan perselisihan dan perbedaan yang terjadi. *Ketiga,* memberikan teladan bagi masyarakat dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Sebagai sosok pewaris nabi, kiai diyakini sebagai sosok yang layak menjadi panutan dan teladan masyarakat. Karena, Kiai tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moralitas yang sangat kuat.[2]

Sedangkan menurut KH. Zainul Fauzan, politik merupakan *medium* (sarana) untuk menciptakan kemaslahatan pada masyarakat. Di samping itu berpolitik bagi kiai muda ini karena bisa dijadikan ruang untuk berdakwah kepada umat dan bisa bermanfaat untuk Islam.[3]

Senada dengan di atas, adalah pendapat KH. Ubaidillah, politik baginya, tidak lain dan tidak bukan selain merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Meskipun dalam kenyataannya ia tidak pernah terlibat langsung dalam politik praktis tetapi beliau aktif dalam ormas Islam (NU).[4]

Begitu juga halnya pendapat KH. Sarif Hasah menurutnya politik adalah sarana untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam alqur'an maupun hadist.[5] Sama halnya dengan pendapat KH. Nur Subairi, ia

---

[2] KH. Abdul Qodir Syam, *Wawancara,* Bondowoso, 22 Oktober 2011.
[3] KH. Zainul Fauzan, *Wawancara*, Bondowoso, 23 Oktober 2011.
[4] KH. Ubaidillah, *Wawancara*, Bondowoso, 25 Oktober 2011.
[5] KH. Munawir, *Wawancara*, Bondowoso, 27 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa politik itu baik, karena politik merupakan cara atau metode dalam menyampaikan dakwah yang di dalamnya harus mencerminkan nilai keadilan dan untuk kesejahteraan masyarakat, serta harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam.[6]

Terakhir, adalah pendapat Ustad Yusuf, ia merupakan salah satu tokoh muda yang aktif di ormas NU, ia mengutarakan bahwa politik merupakan media untuk menentukan seorang pemimpin. Sebagai seorang muslim dan sebagai warga negara yang taat memang seharusnya untuk terlibat dalam setiap momentum politik. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam Islam, tepatnya pada masa pasca wafatnya Nabi pemilihan seorang pemimpin ditentukan dengan cara musyawarah. Namun seiring dengan majunya zaman dan majunya perkembangan sistem politik yang ada, maka dalam menentukan pemimpin pada saat ini ditentukan dengan mekanisme pemilihan umum.[7]

Dari deskripsi di atas, maka makna politik kiai dalam momentum pilkada di kabupaten Bondowoso pada tahun 2008, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Politik merupakan sarana untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.
2. Politik juga merupakan dapat dijadikan sebagai sarana dakwah dalam memperjuangkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.
3. Politik kiai bertujuan untuk sebuah tegaknya kebenaran posisi kekuasaan dan kebijaksanaan publik.

---

[6] KH. Nur Subairi, Wawancara, Bondowoso, 28 Oktober 2011.
[7] Ustad Yusuf, *Wawancara*, Bondowoso, 29 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Politik juga dapat diartikan sebagai ruang dalam memilih dan menentukan seorang pemimpin.

Politik kiai bukan sebuah bencana ketika dimaknai dengan benar dan proposional. Dari kacamata teoritis, haluan politik bagi kiai bukan barang haram. Bahkan, jika merujuk pada kaidah ushul fiqh, hukum berpolitik menjadi wajib, minimal wajib kifayah. Tiga belas tahun lebih, sejak reformasi digulirkan setelah rezim Soeharto lengser hingga kini, tampaknya bangsa ini belum menikmati perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Penyakit akut korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tetap merajalela, kalau tidak boleh dikatakan malah lebih parah. Semangat reformasi terbukti belum mampu mengentaskan bangsa ini dari jurang kebobrokan. Namun, politik kiai akan berubah menjadi proses degradasi kultur dan nilai jika dimanifestasikan dalam ruang politik praktis yang bersifat jangka pendek dan sesaat, seperti halnya, dukung-mendukung tokoh tertentu untuk merebut kepemimpinan partai politik, menjadi juru kampanye calon penjabat eksekutif, dan semacamnya. Sejatinya, politik kiai harus diorientasikan untuk kepentingan jangka panjang dan menyangkut hal-hal fundamental masyarakat seperti kesejahteraan dan pendidikan, serta politik yang bersifat strategis menyangkut eksistensi dan kemandirian Negara dalam pergaulan internasional.

Dengan demikian, keteribatan kiai dalam momentum politik, yaitu dalam pilkada di kabupaten Bondowoso pada tahun 2008, merupakan suatu bukti komitmen dari para kiai untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berbasiskan nilai-nilai yang ada dalam Islam, serta secara khusus dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangka untuk memajukan pendidikan yang ada pesantren di kabupaten Bondowoso. Namun dalam realitasnya, gerakan politik para kiai, tampaknya belum menjadi satu kekuatan yang utuh yang bisa merombak kondisi bangsa ini ke arah yang lebih baik, padahal, sejak reformasi, dalam struktur pemerintahan, baik ditingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, banyak kiai yang menjadi bagian di dalamnya. Akan tetapi, perubahan drastis yang diamanatkan oleh reformasi belum sepenuhnya bisa menjadi fakta yang membanggakan, sehingga dalam realitasnya memunculkan sebuah kesan sederhana bahwa kiai dengan posisi strukturalnya belum mampu menghasilkan kerja-kerja yang berkualitas.

Begitu juga halnya dengan orientasi politik yang berbeda, bisa menjadi faktor munculnya *gap-gap* politik di antara sesama kiai sehingga tidak bisa menafikan adanya upaya untuk saling jatuh-menjatuhkan. Antara satu kiai dengan kiai yang lain akan saling, bisa jadi, kecam dan saling hantam. Inilah embrio awal lahirnya perseteruan baru di kalangan kiai. Hubungan di antara satu kiai dengan kiai yang lain akan mengalami puncak ketegangan yang akan berdampak terhadap eksistensi kiai dalam membangun kehidupan masyarakat dan pesantren. Korbannya sudah jelas, yaitu, masyarakat dan pesantren.

Oleh karenanya, berbagai macam tindakan perilaku politik kiai diatas peneliti memperoleh pengetahuan mengenai ciri dan keaneragaman tindakan dan prilaku politik kiai di masyarakat. Max Weber mengklasifikasikan ada empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Keempat jenis tindakan sosial itu adalah: rasional, rasional nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif.[8]

Max Weber mengakui bahwa empat jenis tindakan sisoal yang diutarakan adalah merupakan tipe ideal dan jarang bisa ditemukan dalam kenyataan. Tetapi, lepas dari soal itu, berdasarkan data dilapangan prilaku politik kiai di Bondowoso termasuk jenis tindakan sosial yang pertama yaitu, rasional, di sini prilaku politik kiai di Bondowoso yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

Maka dari itu, dari analisa Weber pada prilaku politik kiai secara rasional dengan pilihan-pilihan atas tujuan yang lebih bersifat kausal, sehingga kiai dengan pilihannya bertujuan dan ingin berubahan lebih baik. Dengan pola ini melihat peranan kiai yang sampai hari ini masih dalam konteks kiai yang belum terkontaminasi terhadap politik maka dari pada itu masyarakat Bondowoso dalam pandangannya kiai sebagai satu pilihan. Dengan teori Weber itu, relasi prilaku politik kiai (Konstituen) dan masyarakat dapat

---

[8]*Pertama*, tindakan rasional, tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapainya. *Kedua*, tindakan rasional nilai. Menurut model ini seorang pelaku terlibat dalam nilai penting yang mutlak atau nilai kegiatan yang bersangkutan. *Ketiga*, Weber mempunyai sebuah kategori yang ke tiga bentuk tindakan manusia yang bernama tradisional untuk mencakup tindakan berdasarkan kebiasaan yang muncul dari praktek-praktek yang mapan dan menghormati otoritas yang ada. Jenis tindakan ini tidak bisa di anggap cukup sebagai tindakan yang dimaksudkan dan karenanya sebagai tindakan sejati Weber memperhitungkan intensionalitas sebagai suatu yang implisit yang reletif berada di bawah sadar dan dalam segi ini tindakan tradisional tidak sama dengn tindakan efektif. *Keempat*, tindakan efektif dan emosional, yaitu tindakan ini didominasi perasaan atau emosi tanpa reflektif intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan efektif sifatnya spontan, tidak rasoinal, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Lihat. J. Dwi Nrawoko – Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan dengan argumentasi, bahwa pemaknaan individu-individulah yang melahirkan sebuah konsensus, dan konsensus itulah yang pada akhirnya menciptakan relasi-relasi di antara mereka di tengah prilaku politik kiai dan masyarakat terjaga utuh ketika kiai terjun dalam politik dewasa ini.

B. Keterlibatan Politik Kiai dalam Pilkada Kabupaten Bondowoso 2008

Secara historis, dalam proses sosial politik, kiai memiliki posisi yang sangat strategis dalam setiap perubahan yang terjadi di Indonesia. Keterlibatan kiai tidak hanya terbatas dalam peran keagamaan, sosial dan kultural saja tetapi di luar bidang tersebut kiai juga ikut terlibat *intens* dalam perkembangan proses politik sejak Indonesia belum merdeka. Dalam lintasan sejarah kebangsaan Indonesia, kemerdekaan yang berhasil diraih tidak bisa dilepaskan dari peran politik kebangsaan kiai. Dengan pesantrennya, kiai tidak hanya mengelola sebagai institusi pendidikan saja, akan tetapi, juga sebagai pusat gerakan perjuangan untuk melawan kolonialisme. Adapun visi politiknya hanyalah dalam rangka untuk membebaskan bangsa dan negara Indonesia dari belenggu kolonialisme.

Dilihat dari perspektif politiknya, kiai memiliki sejarah tersendiri. Kiai selalu terkait dan dekat dengan persolan politik. bukti-bukti kedekatannya tidak sulit ditemukan dalam lintasan sejarah Indonesia. Sebut saja nama-nama KH. Hasyim Asyari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Wahab Chasbullah dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam perjalanannya, dan di saat menghadapi situasi sosial politik yang sulit pada masa orde baru, Nahdlatul Ulama (NU) secara organisatoris menyatakan menarik diri dari dunia politik praktis dan kembali menjadi organisasi keagamaan yang di kenal dengan putusan kembali ke Khittah tahun 1926, disini dijelaskan juga bahwa yang menjadi pengurus dalam partai politik harus keluar dari Nahdlatul Ulama (NU). Namun, ketika Soeharto lengser (21 Mei 1998) bangsa Indonesia telah bisa 'bernafas lega', karena secara otomatis cita-cita tentang kebebasan yang telah sekian puluh tahun lamanya dibelenggu oleh Soeharto bisa dilepaskan. Dengan ini juga ditandai dengan meledaknya partisipasi politik masyarakat. Kelompok-kelompok politik dan partai politik bermunculan untuk mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan serta tuntutan dari ledakan partisipasi tersebut. Tak terkecuali kaum agamawan (kiai atau ulama) ikut turun gunung menjadi politisi. Mereka yang pada masa Orde Baru diam seribu bahasa, hanya mengelola lembaga pendidikan (pesantren), sejak reformasi telah mulai berubah. Hal ini bukan tanpa dasar, karena reformasi juga telah mendorong kalangan kiai untuk mengambil peran politis dalam kancah dunia perpolitikan, dalam berbagai tingkatan baik di kabupaten, provinsi maupun nasional.

Pasca reformasi, Nahdlatul Ulama (NU) ikut terlibat dalam memprakarsai berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Oleh karena itu, secara historis, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki keterikatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sehingga secara personal memiliki tanggung jawab untuk menjaganya agar tidak keluar dari pakem Islam *"Ahlussunah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waljama`ah" dan garis-garis ke-NUan. Untuk menyerap suara dan aspirasi kaum nahdliyin yang begitu besar dan tidak melanggar Khittah NU 1926 merupakan alasan lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ada dua alasan yang melatari keteribatan (kepedulian) kiai di kabupaten Bondowoso untuk terlibat dalam politik. Pertama, bersumber dari kitab yang membahas politik, yaitu assiyasah (politik) yang juga sering dijadikan referensi dalam pengajian kitab di pesantren. Sebut saja misalnya *Al-Ahkam Al-Sulthoniyyah* karya Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi (364-450 H). dalam kitab ini misalnya dijelaskan tentang bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin negara, tugas seorang pemimpin negara dan sebagainya. Kedua, kiai dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap umatnya. Posisi yang demikian ini dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan, seperti partai politik. Oleh karena itu, secara normatif maupun sosiologis kiai tidak bisa dilepaskan dari kegiatan politik. Dengan demikian, secara teoritik keterlibatan kiai dalam politik di Kabupaten Bondowoso pada pilkada 2008 dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) ajaran Islam mendekatkan elite agamanya agar memikirkan tentang kehidupan bersama, yaitu umatnya; (2) agama seringkali dijadikan alat legitimasi pemerintahan; (3) agama membutuhkan penyampaian misi, dan hal ini memerlukan dukungan kekuasaan.

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, bahwasanya keterlibatan (partisipasi) kiai dalam pilkada di kabupaten Bondowoso pada tahun 2008 dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Partisipasi Aktif

Kesadaran politik dari warga negara menjadi faktor yang sangat signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam dunia politik. Dalam hal ini, ada hal yang sangat urgen untuk diketahui dan ditelusuri kebenarannya, bahwa keterlibatan kiai dalam kancah perpolitikan ini tidak hanya untuk mencari tempat berkreasi dan numpang nama di dalam suatu partai. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa partisipan yang ingin mensukseskan dinamikan politik dari partai yang diusung. Salah satunya yang terlibat disini adalah peran kiai dan masyarakat yang ikut andil dalam pelaksanaan, sekaligus menjadi senjata untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Dalam konteks ini, ada sebagian kiai yang menjadi pengurus partai, bahkan, menjadi garda terdepan dalam mensukseskan pilkada dengan mendukung calon yang diusungnya. Adapun kiai yang terlibat aktif seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel1.15
Bentuk Partisipasi Aktif

No	Nama	Bentuk Partisipasi aktif
1	KH. Salwa arifin (PPP)	Mencalonkan Diri
2	KH. Thahir (PPP)	Mencalonkan diri
3	KH. Sobri (Golkar)	Mencalonkan Diri
4	KH. Zainul Fauzan	Menduduki jabatan tertentu

Pada sisi yang lain, persaingan antara para calon tersebut semakin seru, sebab selisih suara yang diperoleh dari masing-masing calon hanya kalah dengan selisih 16.198 suara. Sebut saja misalnya, KH. Salwa Arifin.

Keterlibatan KH. Salwa Arifin dimulai pada tahun 1993, awalnya ia aktif di organisasi kemasyarakatan NU, sejak tahun 1993 ia menjabat sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketua MWC-NU, sekaligus juga merangkap sebagai ketua RMI (*Robithoh Ma'ahid Islami*) kabupaten Bondowoso. KH. Salwa Arifin tidak pernah merasa menjadi kader atau terlibat dalam partai politik. Akan tetapi, ia yang dijadikan tunggangan partai politik dengan melihat posisi yang diembannya. Pada tahun 1997, KH. Salwa Arifin terpilih menjadi Dewan Syuro NU cabang Bondowoso. Dengan posisi yang strategis tersebut, ia mempunyai kewenangan penuh menentukan pos-pos strategis yang harus ditempati oleh kader NU yang aktif dalam politik praktis.

Namun dalam lintasan sejarahnya, tepatnya pada masa orde reformasi, muncul nama partai baru yang diprakarsai oleh KH. Abdurrahman Wahid, atau yang lebih populis dengan panggilan Gus Dur. Dalam konteks ini, dan untuk mengembangkan, serta membesarkan Partai tersebut (PKB), KH. Salwa Arifin turut andil dalam memprakarsai berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kabupaten Bondowoso. Ia menjadi bagian atau bertindak sebagai deklarator dari berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kabupaten Bondowoso.

Keterlibatannya dalam partai politik tersebut bukan tanpa alasan, ia menuturkan, bahwa keterlibatannya dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak ada maksud lain kecuali untuk membesarkan partai politik yang mempunyai ikatan historis dan emosional dengan Nahdlatul Ulama' (NU). Sehingga, baginya dengan besarnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sedari awal dimaksudkan untuk menjadi saluran aspirasi warga *Nahdhiyyin*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka, secara otomatis Nahdhatul Ulama' (NU) akan besar dengan sendirinya dan mempunyai wadah dalam menyalurkan aspirasi politik warganya.

Namun, pilihan KH. Salwa Arifin dalam memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jelas bukan karena ada ikatan struktural dengan NU, melainkan hanya ikatan emosional saja. Ia memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena merasa bahwa hal itu sudah menjadi persoalan alamiah di mana sebagai manusia mereka berhak untuk berpolitik praktis, seperti halnya para politisi yang berada di partai-partai lain.

Tuntutan untuk kembali memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya warga NU di kabupaten Bondowoso, merupakan landasan mendasar dalam keterlibatannya dalam partai politik. Orientasi gerakan politik baginya, tidak lepas dari semangat untuk menabur kemaslahatan bagi warga NU dan bangsa ini serta menjelaskan dunia politik sebagai medan (arena) untuk menerjemahkan *amar ma'ruf nahi munkar* secara konkret, atau dengan meminjam kerangka Abd. A'la, ulama' harus berperan aktif dalam menyebarkan segala yang *ma'ruf* dan melenyapkan segala *munkar* melalui cara-cara yang islami dan humanistik, *non violence*, penuh hikmah, persuasif, dan dialogis.[9]

Dengan keterlibatannya dalam dunia politik praktis, dan dianggap sebagai salah tokoh yang pengaruh serta mempunyai kharisma yang tinggi bagi masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Hal ini dibuktikan dengan perolehan kursi yang diperoleh oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada

[9]Abd. A'la, *Melampaui Dialog Agama* (Jakarta: Kompas, 2002), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilu 1999, yaitu sebanyak 28 kursi dan paling banyak dari partai kontestan yang lain. Dengan ini, telah membawa karir politik KH. Salwa Arifin untuk berperan lebih jauh dalam dunia politik. Peran ini terbukti dengan dipinangnya KH. Salwa Arifin sebagai Wakil Bupati pada tahun 2003 dan akhirnya terpilih.

Dalam pilkada selanjutnya, dan karena bupati yang dahulu yaitu, H. Muhammad Mas'ud, M.Si. sudah dua periode menjabat. Akhirnya, memantik keinginan KH. Salwa Arifin untuk maju sebagai calon bupati di kabupaten Bondowoso. Namun, pada saat itu nuansa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak seindah ketika ia maju sebagai calon wakil bupati. Kondisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah dipenuhi dengan dualisme kepemimpinan, kubu Gus Dur dan Kubu Muhaimin Iskandar atau yang lebih populis dengan panggilan Ca' Imin.

Pada sisi lain, KH. Salwa Arifin tidak bisa menolak atas permintaan gurunya (KH. R. Fawa'id As'ad Syamsul Arifin) untuk mengunakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai pengusungnya.

Terlepas dari gambaran di atas, geneologi pemikiran dan keilmuan seorang kiai juga tidak dapat diputuskan dari tali temali atau mata rantai para kiai-kiai sebelumnya. Pesantren, salah satunya dikenal dengan ketundukan total santri kepada kiai. Ketaatannya, yang dalam pandangan kekinian, tampak membabi buta. Betapa tidak, apapun yang dikatakan dan diperintahkan oleh kiai ibarat wahyu yang wajib dilaksanakan dan seolah dosa apabila dilalaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Greg Fealy, di dalam dunia pesantren otoritas seorang kiai bersifat mutlak. Tunduk pada kemauan kiai merupakan aturan utama dari konstruksi budaya pesantren.[10]

Sikap di atas terus terbawa sampai akhirnya santri keluar dari pesantren. Kiai tetap dijadikan sebagai guru dan teladan yang selalu dipatuhi dan juga dihormati. Walaupun keyataan ini dalam pandangan pengamat pesantren, ketundukan seorang santri kepada seorang kiai dinilai terlalu berlebihan dan melewati batas nalar rasionalitas. Namun, hal itu dapat dipahami ketika menengok paradigma dan fakta lapangan yang sesungguhnya.

Model relasi kiai dan santri didasarkan pada pandangan-pandangan (biasa disebut pandangan tradisionalis) orang yang terlibat di dalamnya. Dalam pandangan tradisionalis bentuk ketaatan itu merujuk pada beberapa keyakinan.

Pertama, ketundukan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya meniscayakan ketaatan kepada guru. Seorang guru direpresentasikan sebagai wakil Nabi Muhammad saw, sebagaimana hadist yang mengatakan bahwa ulama[11] (baca: kiai) adalah pewaris para nabi. *Kedua*, masyarakat pesantren

---

[10]Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 23-24.

[11]Secara etimologi istilah ulama merupakan bentuk jama' dari 'alim, yang berarti "mengetahui". Dengan demikian, ulama' mengandung pengertian "orang-orang mengetahui". Sementara, apabila ditinjau dari segi terminologis, istilah ulama setidaknya memiliki dua bentuk pengertian, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Secara umum, istilah ulama' digunakan sebagai gelar bagi setiap Muslim yang dianggap memiliki dan menguasai ilmu serta pengetahuan keislaman, ataupun orang-orang yang ditokohkan dalam hal keagamaan. Sementara secara khusus, penggunaan gelar ulama hanya terbatas dianugerahkan kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan dan ahli dalam bidang ilmu-ilmu keislaman serta mampu mengaplikasikannya, di samping didukung juga oleh ketaatan dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga mereka benar-benar dapat dijadikan panutan dan barometer seorang Muslim yang takwa. Lih. Muhammad Idris Abdur Ra'us al-Mabawy, *Qamus Idris al-Marbawy Arab-Melayu* (Mesir: Musthafa Albany-Alhulby, 1985), 40. Lihat Juga dalam John L. Esposito, *Enksiklopedia Oxford: Dunia Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerap merujuk pada *atsar* (baca: perilaku) para sahabat kepada Nabi dalam memperlakukan sosok kiai.

Dua pandangan di atas, semakin diperkokoh oleh sebuah kitab yang mashur (baca: populis) yaitu, *Ta'lim al-Muta'allim* yang di dalamnya memuat aturan normatif tentang bagaimana semestinya memperlakukan seorang guru. Tidak hanya itu, ketaatan kepada seorang guru atau kiai juga meniscayakan kepatuhan kepada keluarga dan kerabat kiai.

Terlepas dari pandangan umum di atas, di kalangan santri (dan masyarakat) ketaatan total kepada kiai diyakini mendatangkan barakah. Barakah adalah sebuah *term* sakral dan nyaris menjadi satu-satunya 'barang' yang dicari dari kiai. Bagi santri, ketaatan dan kepatuhan total kepada kiai diyakini sebagai garansi untuk mendapatkan barakah yang dimaksud.

Namun dalam konteks yang lain, menurut KH. Salwa Arifin terdapat dampak negatif dan positif yang harus diterima apabila seorang kiai terjun dalam dunia politik praktis. Dampak positifnya, menurut beliau bisa membangun kabupaten Bondowoso dengan nilai-nilai islami yang bernuansakan nilai-nilai yang tertanam dan menjadi laku hidup di dunia pesantren. Seperti halnya, kejujuran, toleransi, keadilan, dan lain sebagainya.[12]

Modern (Bandung: Mizan, 2001), Jilid 6, 85. Sedangkan menurut Nurcholis Madjid, Nabi menyebut ulama sebagai pewaris nabi, dengannya dapat dipahami bahwa mereka itu juga mewarisi dan meneruskan terhadap tugas nabi sebagai pengajar, penegak, dan penjaga moralitas masyarakat. Lih. Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 1997), 18. pemaknaan ulama juga bisa dilihat dalam Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 28.

[12] KH. Salwa Arifin, *Wawancara*, Bondowoso, 22 Oktober 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dampak negatifnya, ia mengakui bahwa terdapat stigmatisasi (anggapan) yang miring dari wali santri dari santri yang sedang diasuhnya akan keterlibatannya dalam dunia politik praktis. Hal ini bukan tanpa dasar karena masyarakat kita, khususnya masyarakat santri di kabupaten Bondowoso, masih minim dalam pengetahuan dan kesadaran yang tinggi akan pengetahuan politik. Namun dalam menentukan pilihan politiknya, KH. Salwa Arifin memberikan kebebasan kepada wali santri dan santri dalam menentukan pilihan politiknya. Karena baginya, setiap manusia mempunyai kebebasan yang sama, tak terkecuali masyarakat santri di alam demokrasi ini.

Selain KH. Salwa Afirin yang terlibat (berpartisipasi) aktif dalam politik praktis adalah KH. Zainul Fauzan. Ia merupakan sosok kiai muda dan juga sebagai politisi muda di kabupaten Bondowoso. Karir politiknya, dimulai dari menjadi anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sampai mengantarkannya menjadi salah satu anggota DPRD kabupaten Bondowoso dari partai tersebut.

Alasan senada juga disampaikannya terkait dengan keterlibatannya dalam politik praktis. Berpolitik baginya, merupakan sebuah keharusan. Hal ini tidak lain, dan tidak bukan, hanya dalam rangka untuk menyebarkan kemaslahatan bagi masyarakat. Berpolitik praktis juga tidak lain hanya karena dilatari oleh dakwah demi umat dan bisa bermanfaat bagi umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum. Ruang politik baginya, sama halnya dengan ruang dakwah untuk menyerukan *amar makruf nahi munkar.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut KH. Zainul Fauzan, terdapat hubungan yang jelas antara Islam dan politik. Dalam berpolitik harus dibumbui dengan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Berpolitik bukan hanya dalam meraih kekuasaan sebagai tujuan awal, akan tetapi ruang politik hanya menjadi *wasilah* (perantara) untuk meraih tujuan tujuan yang lebih utama, yaitu meraih kemaslahatan yang nantinya dikembalikan kepada rakyat.[13] Meminjam bahasa Nurcholis Madjid, politik kekuasaan digunakan untuk meraih kebahagiaan lahiriah.[14] Lebih lengkapnya ia menjelaskan bahwasanya:

> "Kekuasaan politik bukanlah tujuan akhir perjalanan hidup kita menuju kebahagiaan, baik pribadi maupun bersama. Kekuasaan politik hanyalah sarana untuk mempermudah tujuan itu. Karena itu, junjungan kita Nabi Muhammad Saw. pun, setelah berhasil membebaskan Makkah dari kaum musyrik Quraisy, diperintahkan Tuhan untuk bertasbih memuji-Nya dan memohon ampun kepada-Nya. Yaitu, meningkatkan diri kepada daratan nilai kehidupan yang lebih hakiki, sebagai kelanjutan dari kesuksesan beliau dalam meletakkan prasarana kehidupan sosial politik".[15]

Begitu juga halnya dengan KH. Thohir, keterlibannya dalam politik dimulai sebagai pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kabupaten Bondowoso, yang pada akhirnya mendampingi KH. Salwa Arifin sebagai calon wakil bupati pada pilkada 2008. Dalam penenuturannya kepada peneliti, keterlibatannya dalam politik dan mau sebagai calon wakil bupati pada pilkada 2008 antara lain karena didasari oleh motif dalam dirinya untuk

---

[13]KH. Zainul Fauzan, *Wawancara*, Bondowoso, 23 Oktober 2011.
[14] Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 1997), 70.
[15] Ibid.,70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperjuangkan Islam dalam ranah publik, dan demi memajukan pendidikan pesantren di kabupaten Bondowoso. [16]

Kiai yang juga terlibat secara aktif adalah KH. Sobri, ia memulai karir politiknya sebagai pengurus partai Golkar, dan ia juga ikut meramaikan dalam kontestasi pilkada kabupaten Bondowoso pada tahun 2008.[17] Ia mendampingi H. M. Misnan dari partai pendukung yaitu Golkar. Alasan senada juga disampaikannya kepada peneliti. Keikutsertaannya dalam kontestasi pilkada di kabupaten Bondowoso pada tahun 2008, tidak lain hanyalah untuk memperjuangkan agama Islam dan masyarakat Muslim, serta dalam rangka memajukan pendidikan pesantren di kabupaten Bondowoso.[18]

Dengan demikian, keterlibatan para kiai dalam politik praktis (pilkada di kabupaten Bondowoso pada tahun 2008) akan semakin memperkuat posisi rakyat sebagai pemilik kekuasaan itu sendiri. Sebab, sebagai representasi dari rakyat, kiai atau ulama' akan lebih leluasa dalam memainkan peran-peran kerakyatan tersebut. Dan meminjam tipologi hierarki partisipasi politik dari Michel Rush dan Philip Althoff, keterlibatan para kiai dalam kancah politik, khususnya di kabupaten Bondowoso termasuk dari tipologi hirarki partisipasi politik. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hirarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administratif.[19]

---

[16] KH. Thohir, *Wawancara*, Bondowoso, 01 November 2011.
[17] KH. Sobri, *Wawancara,* Bondowoso, 02 November 2011.
[18] KH. Misnan, wawancara , Bondowoso 02 november 2011
[19] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: kencana 2010). 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Partisipasi Pasif

Menurut Ramlan Subakti, partisipasi pasif adalah partisipasi yang berorientasi pada *output* politik saja. Dengan kata lain, para partisipan politik hanya menaati peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerinntah, dan menerima serta melaksanakan dari setiap keputusan pemerintah tanpa adanya pertimbangan.[20] Pada tabel di bawah ini adalah bentuk partisipasi pasif kiai dalam pilkada di kabupaten Bondowoso sebagai berikut.

Tabel 1.16
Bentuk Partisipasi Pasif

No	Nama	Pondok pesantren
1	KH. Sarif hasah	Pp. Al-Barokah
2	KH. Abd. Qodir Syam	PP. Raudatul Falah
3	KH. Ubaidillah Nur	PP. Nurul Khalil
4	KH. Abdul Hakim	PP. Tarbiyatul Mutaallimin
5	KH. Malik Sanusi	PP. Nurussam
6	KH. Abdul Mu'iz	PP. Nurul Islam
7	KH. Kurdi Sulaiman	PP. Al-Furqon

Dalam konteks keterlibatan kiai pada momentum pilkada di kabupaten Bondowoso pada tahun 2008, serta analisa data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, KH. Sarif Hasah teridentifikasi dalam partisipasi yang pasif. Hal ini dibuktikan dengan ketidakterlibatannya dalam partai politik tertentu. Untuk soal politik ia menjelaskan bahwa:

> *"Politik nekah sajjenah begus, e dhelem Islam politik nekah padeh bhi' siyasah. Politik nekah begien deri tempat gebey madhepa' pesen se bedheh e dhelem al-Qur'an ben hadist".*[21]
> "politik itu sejatinya baik, dalam terminologi Islam politik merupakan padanan dari kata *siyasah.* Politik merupakan *medium* (sarana) untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadist".

[20] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta, 1992), 141
[21] KH. Sarif Hasah, *Wawancara*, Bondowoso, 24 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan realitas di atas, KH. Sarif Hasah masih peduli dalam dinamika politik yang terjadi di sekitarnya, terbukti dengan keterlibatannya dalam momentum pilkada kabupaten Bondowoso pada tahun 2008, meskipun tidak secara langsung ambil bagian dalam kandidat dari partai politik tertentu. Hal ini bukan tanpa dasar, baginya, yang sejatinya politik bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, namun dalam realitasnya, telah terjadi pergeseran tujuan dari aktor politik tersebut. Ia menambahkan bahwa realitas yang terjadi, rakyat pada gilirannya hanya dijadikan sebagai umpan untuk membentengi kepentingan politik mereka dengan sekian janji yang sangat muluk, tetapi dampaknya tidak pernah "dirasakan". Apalagi, mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan amanat jabatan politik yang diberikan.[22]

Perilaku politik yang sama dengan KH. Sarif Hasah juga ditunjukkan oleh KH. Abdul Qadir Syam, kiai yang juga sebagai ketua Majlis Ulama' Indonesia (MUI) kabupaten Bondowoso ini juga tidak mengambil bagian secara langsung dalam politik praktis. Ia berkeyakinan kalau dirinya masih belum layak untuk terjun dalam dunia politik praktis.[23] Pilihan yang sangat hati-hati yang ditunjukkah oleh KH. Abdul Qadir Syam bukan tanpa dasar. Dalam gugusan sejarah, tepatnya sejak periode 1998, telah banyak kiai yang berhasil menggapai kursi kekuasaan, baik dilegislatif maupun eksekutif, dan telah banyak janji dan harapan yang diobral. Akan tetapi, semua harapan dan

[22] KH. Sarif Hasah, *Wawancara*, Bondowoso, 24 Oktober 2011.
[23] KH. Abdul Qadir Syam, *Wawancara*, Bondowoso, 22 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janji yang dulunya pernah diucapkan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, telah terjadi *disorientasi* dari partai politik. Baginya, partai politik sudah disalah gunakan. Partai politik yang semestinya memperjuangkan hak-hak rakyat, namun realitas yang terjadi di Indonesia malah memperkaya diri, dimana-mana telah terjadi korupsi sehingga rakyat kecil semakin miskin.[24] Dan dalam asumsi masyarakat, banyak kiai yang berpartisipasi aktif dalam politik praktis hanya bertujuan untuk menghidupi dirinya sendiri, kepentingan masyarakat cenderung dinomorduakan. Dengan persepsi tersebut, ketidakpercayaan terhadap kiai semakin mengental, bahkan kiai mulai berkurang dalam mendapat posisi yang terhormat dalam masyarakat. Oleh karena itu keduanya lebih memilih jalur politik kultural (berpartisipasi pasif), daripada berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik praktis.

Begitu juga halnya partisipasi politik yang dilakukan oleh KH. Ubaidillah Nur. Dalam pilkada di kaupaten Bondowoso 2008 ia tidak merepresentasikan dirinya dari partai politik tertentu, atau dengan kata lain, KH. Ubaidillah Nur tidak mengikutsertakan dirinya secara aktif untuk menjadi pengurus partai atau calon tertentu dalam momentum pilkada pada tahun 2008.

Namun demikian, sebagai warga negara yang baik, ketiga kiai di atas, yaitu, KH. Sarif Hasah dan KH. Abdul Qadir Syam, serta KH. Ubaidillah Nur

[24] Ibid., *Wawancara,* Bondowoso, 22 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih terlibat dalam pilihan politik, terbukti dalam pilkada kabupaten Bondowoso pada tahun 2008. Keduanya masih menggunakan hak suaranya dalam menentukan pilihan politiknya. Karena bagi keduanya, siapapun yang kemudian terpilih dalam pilkada yang paling penting bagi keduanya, adalah bisa menjadi pemimpin yang baik, dan dapat membawa angin perubahan terhadap kemajuan kabupaten Bondowoso.

3. Apatis

Dalam kategorisasi Milbarth dan Goel, terdapat bentuk partisipasi yang dikategorisasikan sebagai partisipasi yang apatis. Partisipan apatis ini beranggapan bahwa sistem politik yang ada telah menyimpang dari norma-norma yang telah dicita-citakan oleh bangsa. Hal ini diakibatkan oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga politik yang seharusnya menjadi media untuk membela hak-hak rakyat kecil telah mengalami pergeseran makna dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat.[25] Dalam tabel di bawah ini merupakan bentuk partisipasi apatis kiai dalam pilkada kabupaten Bondowoso sebagai berikut.

Tabel 1.17
Bentuk partisipasi apatis

No	Nama	Pondok Pesantren
1	KH. Munawir	PP. Al-Lathifiyah
2	KH. Nur Subairi	PP. Nurul Hidayah
3	KH. Sa'rohilyas	PP. Imtihadhul Bina'
4	KH. Nur Hotib Tabroni	PP. Darul Hadist

Dalam konteks di atas, menjadi wajar kalau kemudian KH. Munawir lebih memilih untuk mengayomi santri-santrinya daripada berpartisipasi

[25] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu politik,* (Jakarta, 1992) 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara aktif maupun pasif dalam politik praktis. Ia sudah terbiasa dalam setiap pemilu tidak pernah ikut campur. Dengan kata lain, ia sudah terbiasa menjadi golongan putih (golput) dalam setiap momentum politik, tidak terkecuali dalam pilkada kabupaten Bondowoso pada tahun 2008.

Hal di atas bukan tanpa alasan, menurut KH. Munawir orientasi politik yang terjadi tidak seutuhnya dalam rangka membela kepentingan rakyat.[26] Tentunya pilihan ini mempunyai konsekuensi logis yang diterimanya, ia merasa lebih tenang atau tidak ada beban yang difikirkannya dengan ikut serta dalam berpartisipasi politik.

Begitu juga perilaku yang sama ditampilkan oleh KH. Nur Subairi. Pengasuh Pesantren Nurul Hidayah ini juga telah terbiasa *abstain* (golput) dalam setiap momentum politik, khususnya pada pilkada di kabupaten Bondowoso pada tahun 2008. Ia menuturkan pada peneliti, bahwasanya tidak terlibat dalam momentum politik, dapat terbebas dari berbagai kepentingan yang merepresentasikan dari golongan tertentu. Ia lebih bebas dalam bersahabat dengan siapapun dan dari partai apapun. Ia juga lebih menfokuskan hanya dalam dakwah kepada umat, dan dakwah ini bisa dilakukan tanpa harus melalui gerakan politik, atau merepresentasikan dari partai politik tertentu.[27]

Namun demikian, dalam realitasnya, ciri sakral kiai secara perlahan telah mulai memudar, hal ini seiring dengan perubahan paradigma kepemimpinannya, yaitu, dari kepemimpinan kultural pada bentuk (model)

---

[26] KH. Munawir, *Wawancara,* Bondowoso, 27 Oktober 2011.
[27] KH. Nur Subairi, *Wawancara*, Bondowoso, 28 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinan yang pragmatis. Posisi tersebut telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kiai sekaligus mengelupasnya sakralitas kiai di mata masyarakat. Akibatnya, kiai tidak lagi mendapatkan perlakuan istimewa, bahkan derajatnya telah di turunkan layaknya anggota masyarakat kebanyakan. Dengan kata lain, pilihan ke politik praktis oleh para kiai sam halnya dengan menelanjangi dirinya sendiri di mata masyarakat. Tidak ada lagi kewibawaan dan kharisma yang terpancar dari sosok kiai, karena pragmatisme politik telah menjauhkannya dari identitas yang *genuine,* yaitu sebagai sosok dan figur yang bisa menjadi teladan dan pengayom masyarakat dalam semua lapisan. Kiai tidak lagi di anggap sebagai figur terhormat dan penuh wibawa. Tetapi sebaliknya, kiai diposisikan sebagai sosok yang mudah di perjual belikan. Inilah sekelumit yang menjadi alasan KH. Munawir dalam menentukan perilaku politiknya.

Bagi KH. Munawir, sosok kiai merupakan sosok yang berdiri di atas semua golongan dan semua kepentingan. Merujuk pada peran sentralnya, yaitu sebagai lentera bagi umat, sebagaimana institusi pesantren, posisi kiai baginya, memiliki tiga peran pokok yang amat berat. *Pertama,* seorang kiai hendaknya mengoptimalkan perannya sebagai pendidik *(murabbi).* Pencerahan identik dengan pendidikan dan pengajaran, dan kiai memiliki tugas menerangi umat dengan tuntutan agama. *Kedua,* seorang kiai adalah da'i (pendakwah) yang punya tugas bagaimana menerangi masyarakat dan menjadi petunjuk jalan bagi masyarakat. *Ketiga,* kiai juga harus turut serta terlibat secara aktif dalam menyelesaikan setiap problem sosial budaya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perjuangan ini baginya, tidak harus ambil bagian dalam dunia politik praktis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id